

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

Siti Hazar Sitorus, Mukhammad Fatkhullah, Rifda Julastri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Community Development Officer PT Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai

Email: SitiHazarSitorus@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan melalui kebijakan dan program kerja pada kurun waktu 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan wawancara, observasi dan kajian pustaka sebagai instrumennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 program dan 61 kegiatan, peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, (2) Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, (3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, serta (5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Berdasarkan perbandingan dari tahun ke-tahun, program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir mampu meningkatkan produktivitas perikanan budidaya sebesar 6%. Peningkatan terbesar terdapat pada budidaya ikan kolam dengan nilai peningkatan sebesar 108%. Meskipun demikian, terdapat penurunan produktivitas pada budidaya tambak sebesar 24%.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Nelayan, Kabupaten Rokan Hilir

Abstract

This study aims to determine the role and contribution of the Department of Fisheries and Maritime Affairs of Rokan Hilir Regency in community empowerment through policy directions and work programs from 2016-2018. This study uses a qualitative-descriptive method, with interviews, observations and literature review as instruments. Research aims to Of the 10 programs and 61 activities the role of the Department of Fisheries and Maritime Affairs in Rokan Hilir Regency in community empowerment efforts can be seen through: (1) Coastal Community Economic Empowerment Program, (2) Marine Culture Improvement and Maritime Insights to the Community Program, (3) Fishery Cultivation Development Program, (4) Capture Fisheries Development Program, and (5) Fishery Production Management and Marketing Optimization Program. Based on the comparison from year to year, the fishermen community empowerment program by the Department of Fisheries and Marine Affairs of Rokan Hilir Regency was able to increase the productivity of aquaculture by 6%. The biggest increase was in pond fish farming with an increase of 108%. However, there was a 24% decrease in productivity in aquaculture.

Keywords: empowerment, fishing community, Rokan Hilir Regency

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat sekitar 17.499 pulau dengan luas mencapai 7.81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, hanya sekitar 2.01 juta km yang merupakan daratan. Sementara itu, 23.25 juta km² merupakan lautan dan 2.55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif¹. Luasnya perairan yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai negara yang seharusnya memiliki kemandirian dalam bidang perikanan dan kelautan. Sayangnya, dengan besarnya potensi yang ada, Indonesia masih aktif sebagai pengimpor ikan. Ikan-ikan tersebut diimpor dari Oman, Tiongkok, Jepang sampai Pakistan.² Parahnya lagi, ikan yang diimpor bukanlah ikan mentah melainkan ikan olahan yang nilainya sudah jauh lebih tinggi dari harga ikan mentah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar. Salah satu alasan mengapa fenomena tersebut terjadi adalah karena potensi alam yang ada tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni. Hal ini berimbas pada rendahnya kontribusi sektor perikanan pada produk domestik bruto nasional yang hanya sebesar 2.65% pada tahun 2019.³ Sementara itu, sektor industri yang berdiri di atas daratan dengan komposisi 10% dari seluruh wilayah Republik Indonesia justru menjadi andalan dalam menggenjot pertumbuhan PDB nasional.⁴ Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas perikanan nasional melalui peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi pada nelayan tradisional.

Pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah sosial dalam kehidupannya untuk bangkit; mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menyusun

¹ Pratama, O. (2020). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved from DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

² Jannah, S. M. (2018). *70% Wilayahnya Lautan, Kok Indonesia Masih Impor Ikan?* Retrieved from DETIK FINANCE: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4229342/70-wilayahnya-lautan-kok-indonesia-masih-impor-ikan/>

³ Katadata. (2019). *Perikanan Berkontribusi 2,65% terhadap PDB pada 2019*. Retrieved from Databoks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/perikanan-berkontribusi-265-terhadap-pdb-pada-2019>

⁴ Kemenperin. (2020). *Sektor Industri Masih Jadi Andalan PDB Nasional*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/21922/Sektor-Industri-Masih-Jadi-Andalan-PDB-Nasional>

strategi demi menyelesaikan masalah tersebut.⁵ Program pemberdayaan di Indonesia termasuk dalam salah satu fokus dalam Pembangunan Nasional, baik itu pemerintah maupun swasta, hal tersebut berusaha diwujudkan oleh Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Badan Usaha Milik Negara melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat di Indonesia adalah untuk memangkas angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan desa selaras dengan kawasan perkotaan agar terciptanya lapangan kerja.⁶

Kabupaten Rokan Hilir memiliki keunggulan berupa besarnya investasi perikanan baik dari perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan untuk komoditi perikanan laut dengan memiliki sumber daya hayati yang terbarukan. Kondisi ini membuat Kabupaten Rokan Hilir dominan memiliki sumber daya alam pesisir dan laut yang cukup besar, serta juga tersedia sumber daya manusia yang cukup banyak dan cukup handal serta memiliki pasar domestik dalam dan luar negeri.⁷

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir bekerja sebagai nelayan, terutama nelayan tangkap. Nelayan adalah kelompok masyarakat yang fokus utamanya menangkap ikan. Secara umum, profesi nelayan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Dari segi pendapatan, nelayan modern mampu menghasilkan lebih banyak daripada nelayan tradisional karena memiliki alat tangkap yang modern dan metode penangkapan yang lebih efektif. Sehingga dapat dikatakan nelayan tradisional memiliki kesejahteraan yang jauh tertinggal dari nelayan modern.⁸ Oleh karena itu, pemberdayaan seharusnya difokuskan pada nelayan tradisional agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan mencapai efisiensi dalam melakukan pelayaran. Nelayan tradisional dapat terbagi ke dalam dua dua kelompok, yaitu nelayan tradisional kecil yang melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan kapal perikanan yang memiliki angka *gross ton* (GT) tidak lebih dari 5, serta nelayan tradisional besar yang menggunakan kapal perikanan lebih dari 5 gross ton. Berdasarkan

⁵ Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106-134.

⁶ Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., & Habib, M. A. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian desa*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

⁷ Riau Lantang. (2017). *Rokan Hilir Berpotensi di Bidang Perikanan Dan Budidaya Kerang Laut*. Retrieved from Riau Lantang: <https://riaulantang.com/rokan-hilir-berpotensi-di-bidang-perikanan-dan-budidaya-kerang-laut/>

⁸ Yasrizal. (2017). Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional dan Modern di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 23-32. doi:<https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.53>

paparan tersebut, maka Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir merupakan kelompok nelayan tradisional kecil yang menggunakan kapal perikanan 0-5 GT.

Pada tahun 2000 hingga 2003, produktivitas ikan tangkap laut yang dihasilkan oleh sektor perikanan di Kabupaten Rokan Hilir berkisar di angka 70.000 ton setiap tahunnya, namun pada tahun 2004 terjadi penurunan signifikan yang sangat mengkhawatirkan di mana produktivitas ikan berada di angka 30.000 ton per tahun.⁹ Hal ini disebabkan karena terjadinya proses sedimentasi yang berlangsung sangat cepat di daratan Kabupaten Rokan Hilir akibat penebangan hutan mangrove yang dilakukan di sepanjang aliran Sungai Rokan. Hutan mangrove yang berada di sepanjang aliran Sungai Rokan ini memiliki peran penting dalam menghasilkan mikroorganisme yang menjadi sumber makan utama ikan,¹⁰ sehingga penebangannya membuat sumber makan tersebut berkurang.

Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi nelayan, karena berkurangnya sumber makan utama ikan yang dihasilkan oleh hutan mangrove, ikan yang berada di perairan Sungai Rokan mulai mencari makan ke perairan yang lebih dalam, sedangkan fasilitas yang dimiliki nelayan tradisional kecil yang menjadi mayoritas di Kabupaten Rokan Hilir hanya dapat optimal digunakan sejauh maksimal 12 mil dari garis pantai. Pada konteks ini, perubahan yang terjadi pada komunitas nelayan menjadikan mereka rentan terhadap kemiskinan dan tidak berkelanjutan.¹¹ Keadaan ini diperparah dengan keadaan nelayan yang merupakan buruh tangkap yang tidak mempunyai kapal pribadi dengan penghasilan yang rendah. Mayoritas nelayan hanya mampu menghasilkan pendapatan yang habis digunakan dalam sehari karena rendahnya upah yang diberikan oleh pemilik kapal. Selain itu, mayoritas penduduk yang tidak tamat sekolah dasar membuat komunitas nelayan kurang bisa berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan. Hal ini diperparah dengan gaya hidup konsumtif nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Di mana hasil mata pencaharian yang didapat hari itu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga tidak ada investasi untuk jangka panjang maupun keadaan darurat.

⁹ Effendi, M., Nedi, S., & Siregar, Y. I. (2020). The Content of Organic Matter In Water And Sediment of Pulau Halang Muka Discript Rokan Hilir Riau Province. *Asian Journal of Aquatic Sciences*, 3(3), 202-208. doi:<https://doi.org/10.31258/ajoas.3.3.202-208>

¹⁰ Abdullah, A. (1993). *Pengelolaan Hutan Mangrove*. Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH

¹¹ Kusnadi. (2002). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.

Maka dari itu sudah saatnya kelompok nelayan menjadi subjek pembangunan, khususnya oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Hal tersebut didasarkan atas kondisi sosial dan ekonomi nelayan sering kali terpuruk karena pekerjaan yang mereka geluti terkadang tidak berbalas keuntungan atau merugi. Pada tahun 2015, pemerintah melalui Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan di Kecamatan Bangko, Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Kubu dan Kubu Babussalam berupa 30 boat berkapasitas 1 GT serta 8 boat dengan kapasitas 3 GT. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas nelayan yang sebelumnya menangkap ikan hanya dengan menggunakan sampan. Sayangnya, bantuan tersebut tidaklah cukup tanpa adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan menjadi penting dalam mengidentifikasi masalah pada tingkat lokal, menemukan solusi untuk setiap permasalahan, hingga mengadakan perubahan dan inovasi yang membawa kebermanfaatan pada masyarakat nelayan.¹² Kapasitas dan kelembagaan yang baik juga dapat mendorong munculnya produk-produk unggulan tingkat lokal yang bisa dipasarkan baik dalam bentuk produk maupun jasa pariwisata berbasis komunitas (*community based tourism*).¹³ Oleh karena itu, program pemberdayaan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Memberdayakan masyarakat nelayan sama artinya dengan menciptakan peluang dan kekuatan bagi masyarakat nelayan untuk dapat menentukan, merencanakan, dan melaksanakan kebutuhannya hingga tercipta suatu kemandirian permanen dalam kehidupan kelompok masyarakat tersebut.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Tidak hanya sampai disana, penelitian ini juga berusaha melihat keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam meningkatkan produktivitas perikanan di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menarik, karena Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program kerjanya. Sehingga, kontribusi dan capaiannya

¹² Situmeang, M. K., & Kusworo, H. A. (2020). Inovasi Kebijakan Sosial di Tingkat Lokal: Kapasitas Kelembagaan Panglima Laot dalam Pelaksanaan Program Bantuan Asuransi bagi Nelayan. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 25-36. doi:<https://doi.org/10.22146/jds.206>

¹³ Nisa, K. K. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 5(1), 1-12. doi:<http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v5i1.7380>

¹⁴ Alfitri. (2011). *Community Development; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan. Menjadi penting, karena sektor perikanan merupakan potensi terbesar yang dimiliki Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan baik sekarang maupun di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif, dengan cara peneliti mengumpulkan data, kemudian memaparkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari situasi dan kondisi yang didapat di lapangan. Fokus penelitian adalah peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir serta dampaknya bagi produktifitas perikanan, maka unit analisis dari penelitian ini adalah program kerja dan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan observasi kegiatan. Adapun informan dipilih secara purposive yaitu individu dipilih sebagai informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.¹⁵ Dengan dasar tersebut, Kasi Pengendalian Penangkapan Ikan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Bapak Deni Arif, M. Pi., dipilih sebagai informan kunci dan berperan sebagai penunjuk pada informan-informan selanjutnya. Output dari wawancara adalah transkrip, sedangkan observasi berupa foto dan video. Adapun data sekunder didasarkan atas Laporan Tahunan yang merupakan arsip Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2018. Rentang tahun tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa program pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan telah sepenuhnya selesai dilakukan, sehingga dampak dan kontribusinya bisa langsung dilihat melalui laporan yang sudah disusun. Selain dari laporan, kepustakaan juga mencakup hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Program Kerja dan Kebijakan Dinas Perikanan Dan Kelautan

Pengembangan masyarakat seharusnya berfokus pada usaha pemberdayaan masyarakat pada suatu komunitas sehingga mereka memiliki kemampuan dan

¹⁵ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

kesetaraan dengan *stakeholder* lain. Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang selaras dengan konsep *people centered development*. Pemberdayaan ini bisa terjadi pada tingkatan individu, keluarga, kelompok sosial maupun komunitas. Tanpa adanya pemberdayaan, masyarakat kelas bawah atau kelompok yang lemah akan terus tersisihkan dan tertindas tanpa tahu kapan dan bagaimana mereka bisa keluar dari kondisi mereka yang memprihatinkan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, dituntut pula partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai perencanaan sampai implementasi di lingkungan mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik material maupun finansial diharapkan akan meningkatkan baik secara fisik, material, maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan yang dilakukan pada masyarakat tersebut.

Setiap komunitas perlu diberikan kewenangan agar mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab. Sumber daya manusia merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia.¹⁶ Pemerintah dan masyarakatnya akan memiliki hak penuh hal itu disebut juga sebagai otonomi. Komunitas yang baik salah satunya juga harus memiliki otonomi. Komunitas yang baik salah satunya juga harus memiliki otonomi. Pemberlakuan kebijakan Otonomi Desa juga mengundang berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari pemberlakuannya.

Pemberdayaan sebagai suatu program, dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*) yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia. Kemandirian tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka.

Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Ibukota Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir terdapat di Kecamatan Bangko. Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dan dipengaruhi oleh adanya dua

¹⁶ Sumitro. (1994). *Dasar Teori Daerah Pertumbuhan dan Daerah Pengembangan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan temperatur udara berkisar antara 24-32 derajat celcius. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Februari. Jumlah curah hujan berkisar antara 1.173-3.609 mm/tahun dengan jumlah hari berkisar antara 12 sampai dengan 126 hari.

Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 adalah sebesar 627.512 jiwa terdiri dari laki-laki 324.418 jiwa dan perempuan 303.094 jiwa. Bila ditinjau berdasarkan kecamatan maka kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Bagan Sinembah sebesar 138.511 jiwa terdiri dari laki-laki 71.224 jiwa dan perempuan 67.287 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Rantau Kopar sebesar 6.888 jiwa terdiri dari laki-laki 3.540 jiwa dan perempuan 3.348 jiwa.¹⁷

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Perikanan.

Menurut Bapak Deni Arif (2021) *“Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir sejak awal berdirinya menyadari bahwa Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar, khususnya Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu”*.

Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah arah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan perikanan dalam kerangka ekspor, pengembangan industri pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif serta peningkatan pendapatan nelayan;

¹⁷ BPS. (2018). *Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2018*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

2. Mengembangkan kegiatan budidaya perikanan baik kolam maupun keramba yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan;
3. Mengembangkan usaha-usaha perikanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
4. Meningkatkan penganekaragaman produk dan pengolahan hasil perikanan baik melalui industri skala besar maupun skala rumah tangga.

Deni Arif (2021) juga menambahkan “*arah kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam empat Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari*”:

1. *Pengembangan Sumber daya Manusia Pelaku Perikanan dan Kelautan;*
2. *Pengembangan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;*
3. *Pembinaan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;*
4. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan.*

Dalam proses perencanaan dan perundingan program, Dinas Perikanan dan Kelautan menjalin koordinasi dengan instansi pusat dan instansi lain yang terkait. Dalam proses perundingan panjang, teknis implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir kemudian disesuaikan kembali dengan acuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, untuk merealisasikan keempat program pembangunan perikanan tersebut, pada tahun 2016 program-program tersebut kembali dibagi menjadi 10 program. Melalui FGD dan koordinasi lain, 10 program tersebut lantas dijabarkan dalam 61 kegiatan.

Tabel 1. Klasifikasi, Arah Kebijakan dan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016

Klasifikasi	No.	Program dan Arah Kebijakan	Kegiatan		Jumlah	
			f	%	f	%
Pelayanan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	20%	12	20%
Sarana Prasarana	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	10%	6	10%

Kepegawaian	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	2%	2	3%
	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	2%		
Administrasi	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	8%	5	8%
Pemberdayaan Masyarakat	6	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	3	5%	36	59%
	7	Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	4	7%		
	8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	9	15%		
	9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	16	26%		
	10	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4	7%		
Jumlah			61	100%	61	100%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir (2016)

Berdasarkan tabel 1., kebijakan dan kegiatan dalam Pengelolaan Daerah tahun 2016 dapat diklasifikasikan dalam lima kategori, yaitu pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pembinaan kepegawaian, peningkatan mutu administrasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari 10 program dan 61 kegiatan yang ada, pemberdayaan masyarakat mengambil porsi terbanyak dengan total 5 program dan 36 kegiatan atau 59% dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima program antara lain: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, serta Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diwujudkan dalam kegiatan Pelatihan Budidaya Ikan. Pelatihan budidaya ikan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir melalui bidang Perikanan Budidaya, yang mana fokus utamanya adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat nelayan terkait pengembangan kawasan budidaya, produksi dan usaha budidaya, serta kesehatan ikan dan lingkungan. Selain pelatihan program pemberdayaan juga mencakup

Bimbingan Teknologi Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap. Bimbingan teknologi ini diberikan bersama dengan pengadaan modal. Adapun bimbingan yang diberikan adalah seperti pengendalian penangkapan ikan, penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan, serta bimbingan kenelayanan. Pemberdayaan tanpa adanya sarana yang memadai adalah mustahil. Oleh karena itu, program pemberdayaan ke-tiga mencakup Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Kepiting (Percontohan Budidaya Kepiting Soka) di Kec. Pasir Limau Kapas dan Kec. Kubu.

Dalam merealisasikan Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Dinas Perikanan dan Kelautan mengadakan beberapa kegiatan termasuk Peringatan Event Provinsi Riau, Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Provinsi, Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten, dan Gerakan memasyarakatkan makan ikan.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan diwujudkan melalui kegiatan Perencanaan Pembangunan Pabrik dan Lantai Jemur Pakan Ikan, Pengelolaan BBI Ujung Tanjung di Kec. Tanah Putih, Pengelolaan tambak percontohan di Kec. Pasir Limau Kapas, Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila Merah di Kep. Bagan Cempedak Kec. Rantau Kopar, Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Gurami untuk Kelompok Pembudidaya Ikan di Kab. Rokan Hilir, Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Baung untuk Kelompok Pembudidaya Ikan di Kec. Bagan Sinembah dan Bagan Sinembah Raya, Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Nila untuk Kelompok Pembudidaya Ikan di Kec. Rantau Kopar dan Kec. Tanah Putih, Pengadaan Kolam Terpal, Benih dan Pakan Ikan Nila Merah untuk Kelompok Pembudidaya Ikan di Kec. Pujud, serta Pengadaan Keramba, Benih dan Pakan Ikan Nila Merah di Kec. Tanjung Medan dan Kec. Tanah Putih.

Untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap 16 kegiatan yang dimaksudkan antara lain: DED Sarana dan Prasarana TPI, Pengadaan Jaring Perairan Laut untuk Nelayan, Pengadaan Rumah Ikan, Pengadaan Mesin 7 HP untuk KUB Kampung Baru Kec. Pasir Limau Kapas, Pengadaan Boat 1 GT dan Alat Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kab. Rokan Hilir, Pengadaan Peralatan Alat Tangkap Ikan KUB Sinar Maju Dusun Terminal Kep. Ujung Tanjung, Restocking Benih Ikan Baung dan Selais di PUD Kab. Rokan Hilir, Pengadaan Jaring 2,8 Inchi (3 set/unit) / DAK,

Pengadaan Rawai (2 set/unit) / DAK., Pengadaan *Cool Box* / DAK., Pengadaan Bantuan Bot dan Mesin 7,5 HP 13 unit untuk Nelayan Andalan Kep. Sekeladi Hilir, Pengadaan Bot panjang 5 m 20 unit dan mesin 7 HP 20 unit Kelompok Nelayan Terpadu Sekeladi, Pengadaan Sampan Paluh Lengkap 1 GT untuk Kelompok Nelayan Berkat Nelayan, Kep. Bagan Punak Pesisir, Pengadaan Boat 2 GT Kelompok KUB Pantai Bertuah Kep. Sungai Sialang Hulu, Pengadaan Bantuan Peralatan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan Sinar Maju Jl. Madrasah RT.04/RW.02 Dusun Terminal Kep. Ujung Tanjung, Pengadaan Bantuan 2 unit Boat+Mesin untuk Kelompok Senangin Kep. Bagan Punak Meranti.

Sementara itu, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Pengolahan Perikanan dan Kelautan dengan Orientasi Hygienis dan Kemasan Modern, Pengadaan Alat Pengolah Ikan Salai POKLAHSAR Manju Nelayan di Kec. Kubu, Pengadaan Mesin Pencetak Kemasan Produk Perikanan, Bimbingan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, seperti mengenai pembinaan mutu produk, pemasaran dan produksi, serta terkait usaha dan kelembagaan.

Program kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016-2018 memang tidak sepenuhnya mencakup program pemberdayaan masyarakat nelayan. Akan tetapi, program dengan klasifikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan, sarana dan prasarana penunjang, kualitas kepegawaian, hingga administrasi mutlak dibutuhkan guna mendukung kegiatan operasional Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir. Pasalnya, tanggung jawab yang mereka emban tidak hanya tentang bagaimana sektor perikanan dan kelautan dapat menyumbang lebih banyak pertumbuhan untuk PDB, namun juga terkait bagaimana mereka bisa menjalankan pelayanan dan proses pelaporan yang secara rutin harus mereka lakukan.

Meskipun demikian, program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang produktivitas pelayanan masih menjadi prioritas bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan hilir. Sayangnya, program-program yang telah disebutkan lebih pada peningkatan produktifitas nelayan dan pembudidaya. Padahal, terdapat banyak sekali bisnis perikanan potensial di Indonesia. Mulai dari pembekuan ikan, pengawetan ikan kaleng, pengawetan udang kaleng, pembekuan biota air, pengawetan biota air, daging

dan surimi.¹⁸ Hal inilah yang menyebabkan deficit pendapatan dari segi produk kemaritiman. Rendahnya nilai jual dari produk mentah yang dijual ke luar negeri belum mampu menutupi tingginya harga impor produk-produk perikanan yang telah diolah dalam bentuk sarden, makanan kaleng, makanan ringan, hingga frozen food dengan kualitas yang buruk, sedang hingga tinggi. Selain itu, belum terlihat program yang secara spesifik berfokus untuk mengeliminasi aspek kerentanan pada masyarakat nelayan. Padahal, upaya ini penting dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat, serta untuk mempertahankan performa dan produktivitas masyarakat.¹⁹

Kontribusi Melalui Pemberdayaan Masyarakat pada Program Perikanan

Budidaya

Rumah Tangga Perikanan (RTP) kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 3.244 RTP. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari RTP yang mengusahakan budidaya kolam, keramba dan tambak. Dibandingkan tahun 2017, RTP pada tahun 2018 meningkat sebanyak 713 RTP atau sebesar 21.97%. Peningkatan RTP tersebut, salah satunya disebabkan oleh tingginya animo masyarakat dalam bidang budidaya perikanan terutama kolam dan nilai jual ikan hasil budidaya perikanan yang cukup tinggi. Berdasarkan jumlah RTP per Kecamatan, Jumlah RTP terbesar terdapat di Kecamatan Rimba Melintang dengan jumlah 370 RTP, sedangkan jumlah RTP terkecil terdapat di Kecamatan Rantau Kopar dengan jumlah 25 RTP.

Dari hasil wawancara Deni Arif (2021) menjelaskan “*Jumlah keseluruhan budidaya perikanan di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 13.072 Ton, yang mana 5.980,71 Ton bersumber dari budidaya kolam, 73.62 dari budidaya keramba dan 7.017 Ton dari budidaya tambak*”.

Tabel 2. Kontribusi Program Pemberdayaan terhadap Produktivitas Perikanan Budidaya

Jenis	2017	2018	Kontribusi	Persentase
Kolam	2875.17	5980.71	3105.54	108%
Keramba	50.79	73.62	22.83	45%
Tambak	9381.06	7107.87	-2273.19	-24%
Jumlah	14325.02	15180.2	855.18	6%

¹⁸ Hilwa, N. L. (2017). *Analisa Peran Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002-2014*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

¹⁹ Fatkhullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Lahan Gambut melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 15-29. doi:https://doi.org/10.22146/jdsd.2186

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir (2017-2018)

Berdasarkan tabel 2 produksi budidaya perikanan yang bersumber dari budidaya kolam di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 5.980,71 Ton. Dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2017, produksi budidaya kolam mengalami peningkatan sebesar 108.13% atau bertambah sebesar 3.105,54 Ton. Daerah yang memiliki peningkatan produksi terbesar dari usaha budidaya kolam adalah Kecamatan Bagan Sinembah yakni meningkat sebanyak 48.07% atau sebesar 777.38 Ton.

Adapun produksi budidaya perikanan yang bersumber dari budidaya keramba di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 73.62 Ton. Dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2017, produksi budidaya keramba mengalami peningkatan sebesar 45% atau bertambah sebanyak 22.83 Ton. Daerah yang memiliki peningkatan produksi terbesar dari usaha budidaya keramba adalah Kecamatan Pujud yakni sebesar 8.61 Ton atau 26.94%.

Sedangkan produksi budidaya perikanan yang bersumber dari budidaya tambak, di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 7.017,87 Ton. Dibandingkan jumlah produksi pada tahun 2017, produksi budidaya tambak mengalami penurunan sebesar 24% atau 2.273,19. Daerah yang memiliki penurunan produksi terbesar dari usaha budidaya tambak adalah Kecamatan Kubu yakni sebesar 70,56% atau 1.259,31 Ton, Keterangan tentang jumlah produksi budidaya tambak di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 s.d. 2018.

Sayangnya, tingginya produktivitas perikanan tidak ditunjang dengan program yang mampu menunjang aspek keberlanjutan. Paradigma pembangunan yang berfokus pada produktivitas dan kontribusinya terhadap GDP pada banyak kasus akan mengarah pada eksploitasi sumber daya manusia. Pada gilirannya, aktivitas ini dapat merusak lingkungan dan jaminan bagi para nelayan pada generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi dan aksi yang nyata dari berbagai pihak, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam mengedukasi masyarakat melalui program pemberdayaan untuk mendukung kelestarian ekosistem.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui perikanan budidaya yang didampingi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan periode 2016-2018 berhasil meningkatkan produktivitas perikanan budidaya sebesar

6%. Peningkatan terbesar terdapat pada budidaya ikan kolam dengan nilai peningkatan sebesar 108%. Meskipun demikian, terdapat penurunan produktivitas pada budidaya tambak sebesar 24%. Meskipun demikian, perlu adanya program yang mampu menunjang keberlanjutan produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir.

Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Perikanan Tangkap

Jumlah nelayan di Kabupaten Rokan Hilir hingga akhir tahun 2018 berjumlah 15.126. Alat tangkap ikan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir jika dilihat dari cara beroperasinya alat tersebut dibedakan menjadi dua golongan yaitu alat tangkap statis dan alat tangkap dinamis. Alat tangkap statis adalah alat tangkap yang sifatnya tetap atau tidak berpindah-pindah dalam rentang waktu yang relatif lama, alat tangkap jenis ini yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah bubu tiang. Alat tangkap dinamis memiliki sifat yang berlawanan dengan alat tangkap statis, bila alat tangkap statis sifatnya tetap atau tidak berpindah-pindah maka alat tangkap dinamis sifatnya selalu bergerak atau berpindah-pindah. Alat tangkap yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar adalah alat tangkap dinamis dan di antara alat tangkap dinamis tersebut yang paling banyak digunakan adalah jaring (*gillnet*). Daerah penangkapan (*fishing ground*) atau tempat beroperasinya alat tangkap tersebut sejauh 12 mil dari garis pantai.

“pada tahun 2018 kami mendapatkan bantuan alat tangkap ikan sebanyak 512 unit dan 304 unit diantaranya adalah alat tangkap berupa jarring. Alat tangkap ini kami dapatkan dari bantuan APBD. Sehingga kami mampu meningkatkan fasilitas alat tangkap yang sebelumnya berjumlah 3.298 unit (Arif,2021)”.

Jumlah armada perairan laut menurut grose tonase hingga akhir tahun 2018 terdata sebanyak 757 unit untuk PTM, 56 unit untuk MT 0-5 GT, 1.306 unit untuk KM 0-5 GT, 868 unit untuk KM 5-10 GT, 15 unit untuk KM 10-20 GT, 227 unit untuk KM 20-30 GT dan 4 unit untuk KM > 30 GT. Pengadaan armada perairan laut ini dilakukan bersama bimbingan teknologi perikanan kepada masyarakat nelayan agar tercipta masyarakat yang peka terhadap teknologi yang dipakai dan bagaimana memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin.

Simpulan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, (2) Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada

Masyarakat, (3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, serta (5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Adapun arah pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan menjadi dua program utama, yaitu program pemberdayaan perikanan budidaya dan program pemberdayaan perikanan tangkap. Dalam kurun waktu 2016-2018 proses pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 13.072 Ton, yang mana produksi budidaya kolam menyumbang sebesar 5.950.71 Ton, produksi budidaya keramba sebesar 73,62 Ton dan produksi budidaya tambak sebesar 7.017 Ton. Sementara itu, jumlah produksi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir yakni 54.041,38 Ton, yang mana produksi hasil penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) menyumbang sebesar 2.685,55 Ton dan produksi hasil penangkapan ikan di perairan laut sebesar 51.355,83 Ton.

Berdasarkan perbandingan dari tahun ke-tahun, program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir mampu meningkatkan produktivitas perikanan budidaya sebesar 6%. Peningkatan terbesar terdapat pada budidaya ikan kolam dengan nilai peningkatan sebesar 108%. Meskipun demikian, terdapat penurunan produktivitas pada budidaya tambak sebesar 24%. Dengan kata lain, program pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016-2018 dapat dikatakan cukup efektif, walaupun perlu masih banyak diperlukan pembenahan untuk mewujudkan pemberdayaan yang optimal. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah terkait kelembagaan masyarakat, serta perhatian terhadap kelestarian ekosistem dan lingkungan guna mewujudkan penghidupan berkelanjutan.

Referensi

- Abdullah, A. (1993). *Pengelolaan Hutan Mangrove*. Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH.
- Alfitri. (2011). *Community Development; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., & Habib, M. A. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian desa*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- BPS. (2018). *Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2018*. . Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. Brighton: IDS Discussion Paper.
- Dinas Perikanan dan Kelautan. (2016). *Laporan Tahunan 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir*. Bagansiapiapi: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- Dinas Perikanan dan Kelautan. (2017). *Laporan Tahunan 2017 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir*. Bagansiapiapi: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- Dinas Perikanan dan Kelautan. (2018). *Laporan Tahunan 2018 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir*. Bagansiapiapi: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- Effendi, M., Nedi, S., & Siregar, Y. I. (2020). The Content of Organic Matter In Water And Sediment of Pulau Halang Muka Discript Rokan Hilir Riau Province. *Asian Journal of Aquatic Sciences*, 3(3), 202-208. doi:<https://doi.org/10.31258/ajoas.3.3.202-208>
- Fatkhullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Lahan Gambut melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 15-29. doi:<https://doi.org/10.22146/jsds.2186>
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106-134.

- Hilwa, N. L. (2017). *Analisa Peran Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002-2014*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Jannah, S. M. (2018). *70% Wilayahnya Lautan, Kok Indonesia Masih Impor Ikan?* Retrieved from DETIK FINANCE: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4229342/70-wilayahnya-lautan-kok-indonesia-masih-impor-ikan/>
- Katadata. (2019). *Perikanan Berkontribusi 2,65% terhadap PDB pada 2019*. Retrieved from Databoks Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/perikanan-berkontribusi-265-terhadap-pdb-pada-2019>
- Kemenperin. (2020). *Sektor Industri Masih Jadi Andalan PDB Nasional*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/21922/Sektor-Industri-Masih-Jadi-Andalan-PDB-Nasional>
- Kusnadi. (2002). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Nisa, K. K. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 5(1), 1-12. doi:<http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v5i1.7380>
- Pratama, O. (2020). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved from DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Riau Lintang. (2017). *Rokan Hilir Berpotensi di Bidang Perikanan Dan Budidaya Kerang Laut*. Retrieved from Riau Lintang: <https://riaulintang.com/rokan-hilir-berpotensi-di-bidang-perikanan-dan-budidaya-kerang-laut/>

- Situmeang, M. K., & Kusworo, H. A. (2020). Inovasi Kebijakan Sosial di Tingkat Lokal: Kapasitas Kelembagaan Panglima Laot dalam Pelaksanaan Program Bantuan Asuransi bagi Nelayan. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 25-36. doi:<https://doi.org/10.22146/jsds.206>
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi Tejemahan The Ethnographic Interview*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumitro. (1994). *Dasar Teori Daerah Pertumbuhan dan Daerah Pengembangan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Yasrizal. (2017). Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional dan Modern di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 23-32. doi:<https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.53>